

TINJAUAN BUKU

REKONFIGURASI POLITIK KELAS MENENGAH INDONESIA

Gerry Van Klinken & Ward Berenschot (eds). 2014. *In Search of Middle Indonesia: Middle Classes in Provincial Town*. Leiden: Brill. xiii + 239 hlm.

Wasisto Raharjo Jati

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

E-mail: wasisto.raharjo.jati@gmail.com

Diterima: 1-12-2015

Direvisi: 4-12-2015

Disetujui: 11-12-2015

PENDAHULUAN

Membicarakan konsep kelas menengah Indonesia adalah membicarakan dinamika kelas dalam masyarakat yang selalu mengambil peran dalam perubahan sosial dan politik. Hal tersebut dapat terindikasi dari munculnya berbagai macam gerakan politik sejak era pergerakan nasional, revolusi kemerdekaan, hingga era reformasi, yang diinisiasi oleh kelas menengah Indonesia tersebut. Shiraishi (2003) mencatat bahwa politik kelas menengah Indonesia yang didominasi oleh pergerakan kaum muda (*youth movement*) merupakan inti dari perubahan sejarah politik Indonesia. Meskipun bisa dikatakan sebagai agen perubahan politik, derajat kesadaran politik kelas menengah Indonesia sendiri juga fluktuatif. Kondisi itu terjadi ketika berkah minyak (*oil boom*) terjadi pada 1970-an. Pada saat itu, negara memberikan berbagai macam privilese untuk membentuk kelas menengah Indonesia sebagai agen pembangunan.

Kajian Richard Robison (2006) menjadi penting karena membahas mengenai watak kelas menengah Indonesia saat era pembangunanisme, yakni sebagai kelas yang dependen dengan negara. Rezim membangun kelas menengah sebagai bagian dari program membentuk borjuasi baru untuk membangun dan menguatkan proses pembangunan ekonomi negara. Pola tersebut sebenarnya memiliki kesamaan dengan

munculnya inisiasi negara untuk memunculkan orang kaya baru di negara-negara Asia. Malaysia dengan kebijakan Bumi Putera, Korea Selatan dengan *Chaebol*, Thailand dengan borjuasi lokal, dan sebagainya, merupakan sebagian contoh pembangunan kelas menengah sebagai agen pembangunan ekonomi tersebut (Robison, 1996). Konsep itu sebenarnya ingin meniru pembangunan kapitalisme dan modernisasi yang berlangsung di Barat. Negara memberikan ruang bebas bagi pasar untuk menstimulus tumbuhnya borjuasi dalam masyarakat. Namun, pengalaman menumbuhkembangkan kelas menengah antara Dunia Barat dengan Dunia Ketiga mempunyai perbedaan tajam.

Diferensiasi tersebut terletak pada pola intervensi negara terhadap pasar maupun posisi dependen kelas menengah terhadap pasar. Dalam konteks tersebut, Alavi (1972) menyebutkan bahwa posisi kelas-kelas masyarakat dalam masyarakat Dunia Ketiga memiliki otonomi relatif masing-masing sehingga menjadikan negara sebagai arena kontestasi kekuasaan. Namun, negara juga berupaya untuk menundukkan kelas-kelas tersebut agar loyal terhadap negara. Pola relasi negara-masyarakat yang tidak seimbang itulah yang kemudian menciptakan model kelas menengah yang konformis, dependen, dan senantiasa menjaga pola *status quo* terhadap negara. Dengan kata lain, pola pembangunan ekonomi yang dijalankan di negara-negara Asia

adalah sebetuk kapitalisme setengah hati, intervensi negara masih terjadi. Kelas menengah tidak tampil sebagai kelas independen, namun justru menghamba pada negara.

Oleh karena itu, kajian akademik yang mengulas kelas menengah Indonesia kemudian lebih banyak diulas dalam bahasan skeptis daripada ulasan optimistis mengenai kemunculan kelas menengah sebagai agen politik. Studi-studi sosial politik yang dilakukan oleh akademisi, misalnya Leeuwen (2011), lebih banyak mengulas sisi eksternalitas yang ditimbulkan dari pertumbuhan ekonomi tersebut dengan memunculkan adanya kelas menengah sebagai kelas konsumsi baru. Menguatnya gagasan demokratisasi dan wacana masyarakat sipil (*civil society*) pada dekade 90-an kemudian menguatkan partisipasi politik kelas menengah Indonesia dari kelompok kepentingan (*interest groups*) menjadi kelompok penekan (*pressure groups*). Puncaknya adalah demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh gerakan *people power* yang berujung pada mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998.

Mundurnya Soeharto dianggap sebagai kemenangan gerakan *people power* yang diinisiasi oleh kelompok kelas menengah. Namun, setelah itu politik kelas menengah menjadi apatis dan apolitis kembali—sebelum menemukan momentum kembali saat kampanye pemilu 2014 di mana kelas menengah bertransformasi menjadi Relawan mendukung Jokowi menjadi pemenang Pemilu presiden 2014. Terhadap tren fluktuatif yang berkembang dalam politik kelas menengah Indonesia tersebut, kita bisa melihat bahwa derajat kesadaran politik sendiri bergantung pada situasi dan kondisi yang memengaruhinya. Bilamana situasi sosial politik itu cukup afirmatif untuk mendukung keberadaan kelas menengah tersebut, mereka tidak akan bertransformasi menjadi kekuatan politik ekstra parlementer. Akan tetapi, bilamana kondisi sosial politik nasional tidak mendukung keberadaan mereka, mereka akan menjelma sebagai kekuatan politik.

Kajian yang dilakukan Kompas dan Prisma (2012) tentang kemunculan kelas menengah baru menarik untuk dicermati ketika Indonesia mengalami tren pertumbuhan ekonomi yang cukup baik antara tahun 2008–2013. Pada periode itu,

pertumbuhan ekonomi mencapai 5,9–6,2%. Hal tersebut berimplikasi pada menguatnya konsumsi publik dan melahirkan kelas menengah baru. Munculnya kelas menengah baru ini berbeda dengan kelompok menengah yang muncul pas-cabooming minyak pada 1970 yang memperlihatkan watak ketergantungan cukup kuat dengan negara. Kelas menengah baru tahun 2008–2013 ini adalah kelas menengah yang cukup melek politik dan memiliki variasi beragam terhadap segmen keanggotaan kelas tersebut.

Adapun kajian yang dikordinatori Klinken dibantu Ward Berenschot (2014) ini menarik untuk ditelusuri lebih lanjut sebagai kajian politik kelas menengah Indonesia dalam konteks kekinian. Hal yang mendasari studi ini berbeda dengan kajian sebelumnya, yaitu: 1) definisi kelas menengah Indonesia sendiri tidak ditarik berdasarkan estimasi analisis pendapatan dan pengeluaran; 2) ruang kajian kelas menengah Indonesia sendiri tidak difokuskan di kota-kota besar, namun justru kota-kota kecil; 3) kelas menengah tidak dilihat secara nalar etnografis dan antropologis. Ketiga cakupan itulah yang menjadikan konsep kelas menengah Indonesia kemudian menjadi dinamis untuk dibaca secara lebih mendalam. Klinken sendiri menamakan kelas menengah Indonesia sebagai *Middle Indonesia*. Konsep ini sebenarnya merupakan bentuk pengembangan studi yang dilakukan Geertz di Mojokuto yang melihat dinamika kelas-kelas dalam masyarakat.

Sebelum menganalisis lebih lanjut mengenai substansi buku *In Search of Middle Indonesia*, akan dipaparkan terlebih dahulu mengenai meta analisis kajian kelas menengah Indonesia dari masa ke masa.

MENCARI POLA DAN WATAK KELAS MENENGAH INDONESIA

Kajian kelas secara diskursif dalam ranah sosial-politik di Indonesia pada dasarnya adalah gagasan klasik yang senantiasa mengalami dinamika seiring perubahan ekonomi-politik. Kajian kelas ini menjadi penting sebagai perspektif alternatif dalam melihat proses pembangunan pelebagaan politik Indonesia secara makro dalam berbagai hal. *Pertama*, kelas pada dasarnya adalah aktor penting dalam menggerakkan artikulasi

kepentingan dan ideologi mereka secara aktif, baik dalam zaman kolonial maupun prakolonial. *Kedua*, kelas sangatlah memengaruhi struktur ekonomi-politik negara bersangkutan melalui kesadaran dan rasionalitas politik mereka.

JS Furnivall dalam karyanya yang berjudul *Netherland India: A Study of Plural Economy* mendeskripsikan adanya relasi kelas yang terbentuk dalam masyarakat majemuk. Adapun masyarakat majemuk (*plural society*) dijelaskan sebagai bentuk masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen kelas masyarakat yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain dalam kesatuan politik (Furnivall, 2010, 6). Adanya diferensiasi dan kastanisasi dalam kelas masyarakat era kolonialisme tersebut terjadi lantaran dua hal. *Pertama*, pembagian kelas secara horizontal. Pembagian kelas secara horizontal sendiri dapat dimaknai adanya perbedaan suku, ras, maupun agama dalam suatu kesatuan masyarakat. Kelas masyarakat sendiri masih dibentuk atas dasar primordialisme dan chauvinisme-teologis sehingga membentuk *enclave* komunitas kelas dalam suatu masyarakat. Ketiadaan rasa berbau yang ditunjukkan dalam relasi antarkelas disebabkan masing-masing kelas sangat kukuh mempertahankan tradisi dan kebiasaan sehingga relasi antarkelas tidak menghasilkan kepentingan bersama. *Kedua*, pembagian kelas dibentuk secara vertikal. Oleh karena itu, penguasaan ekonomi menjadi kata kunci dalam menganalisis hal ini.

Pada dasarnya, basis historis penguasaan materi ekonomi di Indonesia adalah ras dan status sehingga acap kali disebut perekonomian tropis. Kelas utama pertama dikuasai oleh orang-orang Eropa yang berkuasa akan industri pertanian. Kelas utama kedua dikuasai oleh orang Tionghoa yang berkuasa atas pemasaran. Kelas ketiga adalah masyarakat pribumi sebagai kelas pekerja dan konsumen. Relasi yang terjalin lebih karena adanya pemenuhan materi saja dan kepentingan ekonomi. Strukturasi kelas yang dibentuk tersebut pada dasarnya bagian dari politik *divide et impera*, yakni memecah secara cacah jiwa melalui ras dan ekonomi. Tujuannya adalah membentuk *sense of belonging* dan *token of membership* dalam intra kelas saja.

Adapun pembagian kelas yang demikian kemudian runtuh manakala Indonesia merdeka tahun 1945. Terjadi pola re-organisasi pribumi menjadi kelas utama setelah Tionghoa dan Eropa mulai surut pengaruhnya. Namun, yang terpenting dalam membahas pribumi menjadi kelas utama adalah justru terjadi polarisasi status dan kesejahteraan antarpribumi. Pribumi yang dulunya bekerja sebagai anak buah orang Eropa dan Tionghoa akan menjadi pedagang dan pengusaha berkat warisan alat produksi yang mereka tinggalkan. Sementara itu, bagi pribumi yang hanya menjadi petani, menjadi kelas petani saja apakah itu menjadi *farmers* atau pun *peasant* bergantung pada kepemilikan faktor produksinya. Ada dan tidaknya faktor produksi inilah yang nantinya akan membentuk preferensi politik maupun ideologi yang akan dianut dan diadopsi oleh kelas tersebut. Warisan penting dalam merangkai konteks politik kelas berdasar jenis status, harkat, jabatan, dan kedudukan itulah yang kemudian membentuk adanya politik aliran di Indonesia (Robison, 2008). Kajian Feith dan Castle sudah membagi-bagi politik aliran yang terlahir karena adanya pemilahan kelas tersebut—seperti halnya nasionalisme dan komunisme bagi kalangan kelas petani dan buruh, Islam bagi kalangan priyayi dan borjuasi. Konteks tersebut kemudian berlanjut dalam konsep-konsep lain, seperti NASAKOM, yang sejatinya terlahir pada pemilahan kelas-kelas masyarakat Indonesia tersebut.

Pembahasan kelas dalam segi kepemilikan faktor produksi di Indonesia sebenarnya bukanlah hal baru yang diperbincangkan. Kajian kelas mulai marak diperbincangkan kontemporer pasca 2009. *Prisma* dalam edisi “Kelas Menengah Indonesia Baru” menggambarkan adanya pertumbuhan dan perkembangan Indonesia cukup intens dan masif menjadikan adanya fenomena orang kaya baru pasca 1998. Adanya pertumbuhan Orang Kaya Baru (OKB) sebagai pembentuk dasar kelas menengah di Indonesia sebenarnya bisa dikomparasikan antara tahun 1976 dengan 2009. Kelas orang kaya baru yang tumbuh pada 1976 hadir karena adanya cipratan *oil boom* yang dihasilkan negara. Hal itulah yang kemudian menstimulus adanya industrialisasi di bidang lain sehingga mendongkrak adanya pendapatan masyarakat. Namun, yang perlu dicermati pula

adalah kelas tersebut justru semakin dependen terhadap negara dengan petro dolarnya. Negara juga tampak memelihara kelas-kelas ini sebagai bagian dari basis loyalitas politiknya, kemudian dipermudah dan dipenuhi segala bentuk fasilitasnya, seperti kemudahan mengimpor bahan impor, dan sebagainya. Dalam konteks inilah, kelas menjadi bagian dari kekuasaan prismatic yang dirancang oleh Orde Baru untuk mengikat loyalitas kelas melalui jaringan korporatismenya. Kondisi tersebut yang kemudian mengubah rasionalisme politik dan kesadaran kelas masyarakat Indonesia karena adanya hegemonisasi negara yang begitu kuat di akar rumput. Pada akhirnya, kelas tidak lagi menjadi kekuatan politik informal seperti zaman Orde Lama, namun mereka hanya menjadi kelas-kelas dependen yang diikat loyalitasnya oleh negara melalui kebijakan *floating mass* yang menggencarkan adanya depolitisasi terhadap kekuatan politik lain non-negara, namun tetap tunduk pada negara.

Jika menilik tahun 2009, pertumbuhan kelas menengah berbasis orang kaya baru terjadi lantaran adanya kesempatan ekonomi yang kian merata dan semua orang bisa mendapatkan kue dari perekonomian itu. Hasilnya, kelas menengah itu hadir karena adanya stabilitas ekonomi yang dicapai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus. Hanya saja, jika meninjau secara lebih mutakhir, perekonomian negara yang pada dasarnya disinergikan antara borjuasi asing, borjuasi nasional, maupun pemerintah itu sendiri tidaklah secara utuh menerapkan kepemilikan faktor produksi yang kuat. Perekonomian negara kita, basis industrialisasinya masih dikuasai industri manufaktur dan infrastruktur yang sejatinya rentan. Kelas pada akhirnya akan menjadi jendela bencana dalam konteks pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Adapun konteks diskursif mengenai politik kelas di Indonesia diinisiasi oleh Arief Budiman, Farhan Bulkin, dan Dawam Raharjo. Terminologi kelas diartikan sebagai strata segmen masyarakat yang terdidik dan berpikir rasional kritis yang dihasilkan dari membaiknya iklim pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan informasi. Revivalisme kajian politik kelas dalam era perkembangan

sosial-politik di Indonesia tahun 1970–1980 sendiri banyak dipengaruhi konteks perkembangan relasi perekonomian pusat dengan perekonomian *peripheral*. Kajian ini sebenarnya banyak dikaji oleh para ekonom-politik yang tergabung dalam mazhab teori pembangunan, seperti Andre Gunder Frank, Immanuel Wallerstein, David Harvey, dan sebagainya. Artinya, terjadi pola subordinasi dari perekonomian pusat negara maju kepada perekonomian satelit negara berkembang dalam membangun perekonomiannya. Dalam konteks pembangunan ekonomi yang sedemikian itulah, konteks kelas kemudian berkembang dalam kerangka “otonomi relatif” seperti yang diutarakan Hamza Alavi dan John Saul. Kelas memiliki otonomi tersendiri dalam mengatur dirinya sendiri, namun seraya masih menjaga hubungan dependensi dengan negara. Hal itulah yang menjadikan kajian politik kelas di negara berkembang menjadi dua kaki antara independen secara ekonomi, namun dependen secara rente.

Peristiwa Malari 1970 merupakan bentuk protes terhadap pelaksanaan pemilu 1971 yang telah di-*setting* untuk memenangkan rezim Orde Baru. Adanya pembungkaman secara ekonomi maupun politis terhadap posisi kelas oleh rezim berkuasa justru menjadikan analisis kelas berkembang lebih konservatif dan mendukung eksistensi kekuasaan *status quo* rezim. Hal itu karena kelas menengah terbuai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang masif sehingga menurunkan daya kritis terhadap rezim. Adanya proses depolitisasi yang kuat hingga akar rumput mengubah orientasi politis kelas sendiri menjadi *swing voters* yang hanya menjadi massa mengambang dalam pemilu. Artinya, telah terjadi proses pragmatisme politik dalam mendudukkan kelas menengah kita hanya sebagai *voters* dan bukan sebagai *determiner* dalam pengarusutamaan kekuasaan di Indonesia. Implikasinya ialah suksepsi melalui proses elektoral yang terjadi selama kurun waktu 1971–1997 tampak berjalan lancar tanpa adanya proses pengawalan politis dari kelas masyarakat.

Farhan Bulkin (1984) dalam *Pokok-Pokok Pikiran Kelas Menengah* menjelaskan secara terperinci bagaimana kelas itu kembali hadir dan terbentuk dalam buaian fasilitas negara. Bulkin

mendefinisikan kelas menengah sebagai kelas yang mempertahankan adanya sistem reproduksi modal yang luas, buruh diperlakukan sebagai komoditas, pemaksaan yang bersifat ekonomis, pemisahan kekuatan ekonomi dari negara, seraya berorientasi pada pasar. Adanya konteks itu sebenarnya mengindikasikan adanya kelas sebagai *petty bourgeois* yang dipelihara negara untuk kemudian berkembang menjadi pelaku industrialis. Model kapitalisme semu menitikberatkan pada kelas tersebut karena pada dasarnya negara masih mempertahankan kontrol atas kelas secara sosial-politik, namun memberikan kelonggaran ekonomi kepada kelas. Budiman (2000) melihat gejala kelas yang dipelihara negara ini sebagai kelas-kelas komprador yang pada nantinya akan menjadi agen pembangunan semu yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berbasis konsumsi, namun labil dalam membangun fondasi dasar ekonominya.

Namun demikian, tidak selamanya kajian kelas pada era 1970–80-an banyak berkembang dalam kajian neomarxis dan pembangunanisme. Dawam Raharjo berusaha menarik simpul lain terhadap kajian kelas ini di Indonesia. Analisis kelas yang disampaikan Dawam Raharjo (1999) dalam *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial* berangkat dari latar belakang yang sama dengan analisis Budiman dan Bulkin, yakni adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dan stabil pasca-*boom* minyak dan masuknya Penanaman Modal Asing. Dawam kemudian menitikberatkan kelas sebagai hadirnya kelompok masyarakat baru yang memiliki tata susunan berpikir, masyarakat, ekonomi, dan sosial baru yang tidak pernah dikenal sebelumnya, seperti lazimnya tumbuhnya kelas menengah baru di Eropa pascarevolusi industri. Mereka adalah kelas masyarakat terdidik dan memiliki pendapatan yang lebih baik ketimbang kelompok masyarakat lain. Munculnya mereka juga merupakan bentuk inisiasi awal dari tumbuhnya pemahaman *rule of law*, Hak Asasi Manusia, Konstitusionalisme, dan Demokrasi. Hal itu yang menjelaskan kenapa kelas menengah ini dalam terminologi Dawam Raharjo disebut masyarakat madani, yakni kelas yang terdidik dan tercerahkan, baik secara kesadaran berpolitik maupun

rasionalitas, sebagai kekuatan politik ekstraparlementer. Artinya, terjadi sivilisasi terhadap kelas yang berkembang sebuah aliansi besar bernama masyarakat sipil (*civil society*).

Adapun munculnya istilah *civil society* pada medio 1998 sendiri adalah upaya untuk mereaktivasi orientasi politik kritis dan rasional kelas menengah masyarakat tersebut. Hal itu kemudian berimplikasi pada proses penumbangan rezim Orde Baru yang berkuasa. Diskursus *civil society* banyak menonjolkan independensi politik dan kritisisme publik dalam kehidupan politik, yang kemudian menghasilkan adanya rasionalitas dan kecerdasan berpolitik. Hasilnya, selama kurun waktu pemilu 1999–2004, tingkat partisipasi pemilih mencapai 92 persen, tercatat sebagai persentase pemilih terbesar sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Namun, yang menjadi distorsi dalam wacana kelas menengah dan proses elektoral di Indonesia adalah munculnya dua fenomenologis politik yang berposisi biner, yakni bersikap kritis dan rasional, namun ingin menikmati segala bentuk *status quo* maupun bentuk keistimewaan ekonomi-politik yang diberikan oleh rezim. Adapun proses elektoral selama kurun waktu 2004 hingga 2009 dapat menjelaskan fenomena tersebut, yaitu partai elite lama berkuasa dan hanya menyisakan adanya sedikit transformasi politis. Kemenangan SBY dan Demokrat dalam pemilu 2004 dan 2009 sebenarnya sangat ditentukan oleh kelas menengah yang rasional kritis dan menginginkan adanya *status quo* dan menghindari adanya gejolak revolusioner yang mengancam segala bentuk kenyamanan kelas menengah ini.

Hal yang perlu dicermati mengenai perbandingan kelas hari ini adalah semakin mudarnya rasionalitas dan depolitisasi kelas itu sendiri. Memang dalam beberapa cakupan, ada kelas yang masih mempertahankan adanya idealisme dan rasionalitas politiknya. Namun demikian, ada temuan menarik, yakni manakala pembelajaran demokrasi di Indonesia sendiri semakin mendalam, nalar intelektualisme politik publik juga semakin meningkat. Hasilnya kini bisa kita lihat adanya gejala golongan putih yang semakin meninggi maupun juga semakin apolitisnya kelas dalam menanggapi isu tertentu. Dua gejala terse-

but mengindikasikan adanya kronologis politik kelas kita yang sebenarnya fluktuatif, yakni ada saatnya untuk menjadi agen politik aktif dengan ikut pada aksi perombakan rezim. Namun, pada saat bersamaan menjadi pasif hanya menjadi penonton saja.

Adapun dalam kajian mengenai kelas dalam analisis Gerry Van Klinken (2014) dalam *In Search of Middle Indonesia* disebutkan bahwa formasi kelas dalam masa Indonesia kontemporer sekarang ini dibangun atas dasar perekonomian yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi tinggi. Pertumbuhan kelas menengah di Indonesia sangatlah cepat dan masif di luar perkiraan analisis Bank Dunia maupun ADB. Pertumbuhan kelas menengah yang cepat tersebut memang berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi. Namun, yang perlu diwaspadai kemudian adalah akselerasi dan redistribusi pendapatan ekonomi yang tidak seimbang. Struktur perekonomian di kota dengan desa menjadikan konteks pertumbuhan kelas juga menjadi beragam. Kelas menengah kota dapat memosisikan dirinya sebagai kelas menengah yang *established*, sedangkan masyarakat kelas menengah desa cenderung subsisten karena redistribusi pendapatan yang tidak seimbang. Formasi kelas yang sedemikian itulah yang nantinya menentukan kadar politiknya. Secara garis besar, rasionalitas dan kesadaran politik kelas di kota lebih baik ketimbang di desa karena keterbukaan informasi yang cukup luas. Adapun kelas menengah di desa sendiri masih dalam pergulatan patrimonialisme dalam menentukan orientasi berpoliticnya.

Pada pemilu 2014, gejala rasionalisme politik yang ditunjukkan oleh kelas menengah Indonesia sangat menguat. Penguatan golput yang masih ada manakala gejala deprivasi antara harapan dan realistis akan politik kian menipis. Namun demikian, rasionalisme tersebut tidak hanya berbentuk sikap golput saja. Rasionalisme kelas menengah rupanya juga memberikan preferensi kuat mengenai sosok kepemimpinan ideal untuk negara ini ke depannya. Adanya berbagai hasil survei dari berbagai lembaga survei menunjukkan orientasi politik kelas menengah di Indonesia mengarah pada proses transformasi politik dalam suksesi kepemimpinan. Transfor-

masi yang dimaksudkan adalah orientasi politik kelas menengah lebih mengacu pada populisme figur daripada popularitas figur. Namun, pada saat bersamaan, potensi kelas menengah untuk menjadi *agent of change* masih terfragmentasi antara yang menghendaki perubahan rezim baru dengan yang memilih menjadi bagian rezim lama. Adanya orientasi politis kelas menengah yang masih ambigu inilah yang masih menjadi pekerjaan besar dalam merumuskan korelasinya dengan politik. Manakala independensi dan rasionalitas telah dicapai, pada saat bersamaan preferensi politik masih digerakkan oleh *by issue* dan *by accident* yang ditentukan pada isu *framing* jurnalisme politik.

MIDDLE INDONESIA SEBAGAI TAWARAN KONSEPTUAL

Pengertian *Middle Indonesia* dapat dianalisis sebagai bentuk kelas masyarakat yang sifatnya *in-between* yang melakukan mediasi ruang antara desa-kota, pusat-pinggiran, dan juga modern-tradisional (hlm. 7). Gagasan tengah-tengah (*in between*) tersebut menunjukkan bahwa kelas menengah Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur relasi antarkelas dalam masyarakat. Gagasan *Middle Indonesia* sendiri merupakan pengembangan riset Clifford Geertz (1963) tentang *Religion of Java*. Namun, yang ditekankan dalam tulisan ini bukan relasi trikotomi agama-santri-priyayi yang menjadi temuan penting dalam karya tersebut. Melalui pengamatan di Mojokuto, Geertz sendiri menemukan dua basis penting pembentuk watak dan karakter kelas menengah Indonesia hingga kini, yaitu: 1) pembangunan kelas menengah Indonesia dibangun dalam nuansa informalitas ekonomi yang cukup tinggi. Adanya mobilitas cukup tinggi dari desa-kota menjadikan pertumbuhan ekonomi informal menjadi basis penting pembentuk faktor borjuisasi kelas menengah Indonesia. 2) Alih-alih membentuk kelas menengah yang independen, kelas menengah Indonesia mengalami banyak tantangan sosial politik dari pemerintah, dan dari kelas-kelas masyarakat di Indonesia.

Hal menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah *Mojokuto*, sebuah istilah komparatif untuk padanan riset Robert dan Helen Lynd (1924) dalam

melihat segi spiritual dalam budaya masyarakat Amerika Serikat yang kemudian berkembang menjadi analisis pemilahan sosial. Lynd dalam studinya berjudul *Middletown: A Study in Contemporary American Culture* menyebutkan terdapat enam karakter kelas menengah dalam kasus Amerika. Keenam segmen kelas menengah tersebut mewakili kelompok informal, semiformal, dan formal terbatas dalam kasus Amerika. *Mojokuto* diartikan sebagai 'kota tengah' sebagai padanan kata *middletown*, yakni untuk melihat transformasi sebuah kota-kota kecil berikut juga mobilisasi dan migrasi orang, barang, dan jasa.

Ada perbedaan signifikan untuk kasus Kota Tengah antara Indonesia dengan pengalaman Barat. Kelas menengah di Barat menunjukkan posisi independen dengan negara dan memiliki faktor alat produksi yang memadai. Sementara itu, kelas menengah Indonesia masih setengah hati antara dependen dan independen dengan negara. Hal itulah yang menyebabkan konteks kelas menengah Indonesia sendiri tidak melepaskan realitas untuk menjaga hubungannya dengan negara. Beragam kasus dalam buku ini menunjukkan bahwa derajat relasi politik kelas menengah Indonesia dengan negara selalu naik turun. Kasus Pekalongan dan Yogyakarta menarik dikaji untuk melihat relasi negara dan masyarakat yang mengalami turbulensi. Adanya perubahan sosial dan politik seiring bergantinya rezim menyebabkan infrastruktur politik pada aras masyarakat juga mengalami pergeseran cukup mendasar. Kasus Yogyakarta menunjukkan adanya perubahan signifikan masyarakat yang mengalami fase tradisionalitas menuju modern. Sementara itu, kasus kelas menengah yang berada di Pekalongan menunjukkan derajat bahwa munculnya agensi dan broker politik yang masih eksis menjadikan liberalisasi ekonomi-politik kelas menengah Indonesia menjadi terhambat. Hal itu serupa dengan kasus yang ditemukan di Cilegon dan Pekalongan yang menunjukkan agensi/broker politik yang berkuasa untuk menjembatani negara-kelas menengah Indonesia. Kasus itu serupa dengan temuan Hariss-White dalam kasus India yang menunjukkan adanya agen informal ekonomi yang berkuasa dalam perekonomian informal pada aras lokal.

PENUTUP

Secara garis besar, buku ini berhasil memperlihatkan temuan *Middle Indonesia* secara otentik dan artikulatif dalam kasus setiap kota-kota provinsi di Indonesia. Masing-masing kota tersebut menampilkan adanya berbagai ciri khas mendasar mengenai watak dan karakter kelas menengah Indonesia yang dimaksudkan. Kajian kelas dalam ranah sosial dan politik Indonesia senantiasa mengalami pembaruan yang bergantung pada situasi dan kondisi zaman. Secara makro, pemahaman kelas sangatlah identik dengan apa dan bagaimana satu atau lebih entitas kelompok masyarakat kemudian berkontestasi dan bersaing dalam memperebutkan sumber daya ekonomi. Hal itulah yang kemudian menciptakan adanya strata sosial yang lazim disebut kelas. Relasi kelas sebenarnya kontradiktif, namun juga bisa kompromistis, bergantung pada cara mereka mendapatkan sumber daya ekonomi. Dari situlah kemudian terbentuk kekuasaan dan perlawanan dari kelas kepada kelas lain untuk merebut kontrol tersebut. Implikasinya adalah muncul rasionalitas dan kesadaran sebagai kelas.

Dalam konteks Indonesia, kelas juga dipengaruhi struktur ekonomi-politik yang sama dengan skala dunia. Namun demikian, kondisi kelas di Indonesia sendiri masih perlu banyak perbaikan terkait dengan pembentukan rasionalitas dan kesadaran berpolitik mereka sebagai sebuah satu kesatuan. Kelas di Indonesia pada satu sisi sendiri mengharapkan dirinya independen. Namun, pada sisi lain, kelas juga masih perlu menjaga ketergantungannya terhadap negara. Hal yang menjadi tantangan besar bagi ilmuwan sosial dan politik adalah bagaimana cara merumuskan perspektif kelas untuk ke depannya.

PUSTAKA ACUAN

- Budiman, Arief. (2000). *Teori Pembangunan Negara Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia.
- Bulkin, Farchan. (1984). Kapitalisme, golongan menengah dan negara: Sebuah catatan penelitian. *Prisma*, 4, 1–39.
- Bulkin, Farchan. (1984). Pokok-pokok pikiran kelas menengah. Dipresentasikan pada PAIS (Percakapan Ahli Ilmu-Ilmu Sosial) FISIP Universitas Indonesia, Oktober 3–4.

- Furnivall, John. (2010). *Netherland India: A study of plural economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Klinken & Ward Berenschot. (2014). *In Search of Middle Indonesia: Middle Classes in Provincial Town*. Leiden: Brill.
- Kompas. (2012). *Siapakah Kelas Menengah Indonesia*. Retrieved from "<http://nasional.kompas.com/read/2012/06/08/13003111/Siapa.Kelas.Menengah.Indonesia>". Diakses 6 April 2016.
- Leeuwen, Lizzy. (2011). *Lost in mall: An ethnography of middle-class Jakarta in the 1990s*. Leiden: KITLV Press.
- Prisma. (2012). Kelas Menengah Indonesia: Apa yang Baru? *Prisma* 31: 1–89.
- Raharjo, Dawam. (2001). *Masyarakat madani: Agama, kelas menengah, dan perubahan sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Robert & Helen Lynd. (1924). *Middletown: A Study in Contemporary American Culture*. Oxford: Harcourt.
- Robison, Richard & Goodman (eds.). (1996). *The new rich in Asia: Mobile phones, Mcdonald's and middle class revolution*. London: Routledge.
- Robison, Richard. (2008). *Indonesia: The rise of capital*. London: Equinox Publishing.